

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional. Hubungan internasional sering disamakan dengan studi internasional, walaupun sama-sama mempelajari hubungan antar negara. Dari sejarah perkembangannya studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yaitu dimana hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya saling timbal balik. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional lahir dengan tujuan untuk mencegah perang dan membangun perdamaian. Sehingga secara serius terdapat upaya-upaya untuk memunculkan ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi, 2015 : 12).

Aktor hubungan internasional bisa saja merupakan merupakan aktor negara atau juga aktor non-negara seperti yang dijelaskan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional:

“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu” (Perwita&Yani, 2014: 4).

Dari definisi diatas pada hakikatnya nya hubungan internasional mengacu kepada segala bentuk interaksi antara aktor, baik yang bersifat memerintah atau non pemerintah, termasuk kajian mengenai kondisi relevan yang mengitari interaksi tersebut dimana dalam pengertian seperti diatas. Aksi diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh aktor, sedangkan kondisi dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang melingkupi aksi, baik yang memberikan peluang maupun hambatan, sehingga diantara aksi dan kondisi bisa saling mempengaruhi satu sama lain.

Seiring berjalannya waktu, dimana dunia internasional melebur menjadi satu kesatuan dikarenakan kesadaran dari setiap peristiwa bahwa adanya kepentingan bersama di atas bumi ini dipijak. Bukan saja aktor, tapi kehidupan menyatu dalam kehidupan masyarakat melalui sebuah fenomena *globalisasi*. Bisa dianalogikan bahwa negara-negara telah kehilangan batas-batas wilayahnya karna didukung kemajuan teknologi dan komunikasi (Perwita&Yani, 2014: 15).

Sementara terkait dengan penelitian ini teknologi dan komunikasi menjadi elemen penting dari sebuah hubungan internasional, ini termasuk ke dalam *specific interest*, kepentingan yang tidak termasuk dalam kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana .

2.1.2 Perkembangan Konsep Keamanan

Konsep keamanan adalah hal yang sangat penting dibalik kemajuan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi di dunia. Setiap suatu teknologi berkembang, maka kita pun harus memikirkan konsep keamanan yang handal, karena di jaman ini banyak informasi-informasi penting yang disimpan dengan mengandalkan teknologi-teknologi tersebut. Konsep keamanan harus selalu

dipikirkan karena berhubungan erat dengan kebergunaan suatu sistem. Karena, jika suatu sistem memiliki keamanan yang buruk, maka akan sedikit orang yang menggunakan sistem tersebut.

Adanya berbagai konflik di berbagai belahan dunia seperti konflik etnis, konflik antar negara maju dan negara terbelakang, pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim otoriter dan makin pesatnya proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menempatkan makna keamanan telah pesat berkembang seiring dengan proses peradaban manusia. Akibatnya, penyelesaian keamanan yang lebih mengedepankan kekuatan militer dianggap hanya memberikan keamanan untuk sebagian orang, sementara di lain pihak sebagian lainnya merasa terancam penderitaan dan ketakutan. Maka dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa konsep keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan (*contested concept*), yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda, hal ini disebabkan makna konsep keamanan makin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antarbangsa (*international relations*) dalam era globalisasi.

Masalah keamanan merupakan persoalan yang penting bagi seluruh negara di dunia, dan bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam pelaksanaan politik luar negeri dan kepentingan nasional masing-masing negara mencantumkan keamanan sebagai salah satu yang penting untuk dibahas dan menjadi tujuan nasional. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi yang semakin meningkat mengakibatkan meningkatnya mobilitas sosial, juga dapat mengakibatkan gejala-gejala perubahan internasional di bidang kejahatan internasional (Wardoyo, 2015 : 47).

2.1.2.1 Keamanan Nasional

Keamanan nasional adalah kebutuhan dasar bagi suatu bangsa untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi suatu faktor utama dalam konsep keamanan nasional suatu bangsa. Selain menjaga dan melindungi, keamanan nasional juga bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara. Konsep keamanan menekankan peran pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Definisi keamanan nasional pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin adalah ketergantungan negara akan kekuatan militer. Perubahan definisi keamanan nasional sendiri berubah semenjak globalisasi telah mencakup semua lapisan masyarakat. Ancaman tidak lagi berupa ancaman militer, melainkan fenomena-fenomena kerusakan lingkungan, perkembangan teknologi informasi komunikasi dan ancaman dari aktor-aktor *non-state* (Sekjen Wantanas, 2010: 9-10).

Berbagai perkembangan seiring globalisasi kini menjadikan keamanan nasional memiliki dampak yang besar dan fleksibel, hingga terciptanya keamanan dan ketidakamanan baik dalam skala lokal, regional bahkan internasional.

Kaum realisme dengan pendekatan militer (*power*) menyatakan bahwa konsep keamanan merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara-bangsanya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal (*the absence of a military threat or*

with the protection of the nation from external overthrow or attack) (Perwita, 2008: 3).

Sejalan dengan perkembangan fenomena-fenomena dalam hubungan internasional begitu cepat, Barry Buzan dalam Perwita menyatakan :

“Keamanan tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor negara semata melainkan akan meliputi aspek-aspek non militer dan melibatkan pula aktivitas-aktivitas aktor non-negara”. (Perwita, 2008: 4).

Buzan dalam bukunya yang bertajuk “*People, State and Fear*” membagi sektor keamanan ke dalam 5 sektor: Militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan *societal*. Berdasarkan pendekatan ini, Buzan memasukan sektor militer hanya sebagai salah satu aspek penting dari konsep keamanan. Sementara itu, keamanan lebih luas dan menyeluruh akan dipengaruhi pula pada sektor politik, ekonomi, lingkungan, dan *societal* baik dari peringkat individu, nasional, regional dan global. (Perwita, 2008: 5)

Sumber ancaman tidak lagi bersifat militer, bahkan dalam banyak kasus sumber ancaman bisa bersifat militer dan non-militer. Lebih khusus, keamanan pun bukan hanya ditujukan bagi kelangsungan negara saja tetapi juga menjadi kebutuhan bagi semua aktor lainnya. Seperti yang ditulis dalam *Report of the Secretary-General’s High-Level Panel on Threat, Challenges and Changes*, “Hari ini, lebih dari sebelumnya, ancaman bagi seseorang adalah ancaman bagi semua orang. Kerentanan timbal balik yang lemah dan kuat tidak pernah jelas” (diakses <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-secretary-generals-high-level-panel-report-on-threats-challenges-and-change-a-more-secure-world-our-shared-responsibility/> pada tanggal 8 Mei 2017).

Berbagai konsepsi ancaman keamanan di atas selain menunjukkan adanya perluasan makna dari perspektif tradisional menuju non tradisional, juga melibatkan aktor yang beragam (*non-state*) yang terlihat dari dinamika interaksi antara aktor dan sektor keamanan. Tingkat kerumitan dari sifat dan struktur sistem internasional yang dihasilkan oleh interaksi para aktor yang semakin tinggi, memunculkan pula beberapa alat analisa tambahan lainnya yang digunakan untuk mengkaji tipe aktor dan interaksi keamanan yang dihasilkan (Perwita, 2008: 10).

Peter Chlak dalam Perwita mengemukakan fenomena global kontemporer diwarnai oleh “fenomena abu-abu” (*Grey Area Phenomena*). Fenomena ini didefinisikan sebagai “ancaman-ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional yang diakibatkan dari proses-proses interaksi aktor negara dan non negara”. Akibatnya, fenomena-fenomena global yang bermunculan semakin beragam. Fenomena-fenomena baru meliputi: ketidakamanan ekonomi, degradasi lingkungan dan penggunaan kemajuan teknologi informasi sebagai alat ancaman.

Munculnya berbagai fenomena baru seperti diatas sebagai sifat-sifat baru ancaman yang berkolerasi amat kuat dengan “*changing response*”. Bila selama ini respon terhadap fenomena global adalah dengan kekuatan militer, maka kini fenomena-fenomena tersebut ditanggapi dengan berbagai pendekatan-pendekatan non-militer. Singkatnya, pendekatan menggunakan kekerasan/militer sepatutnya digeser dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat non-militer (Perwita 2008: 13).

Perbedaan antara pendekatan tradisional dan non tradisional dalam menyikapi konsep keamanan dapat dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Konsep Keamanan Tradisional dan Non Tradisional

	Tradisional	Non Tradisional
Asal ancaman (<i>origin of threats</i>)	Negara rival	Non-negara: domestik dan transisional
Sifat ancaman (<i>nature of threats</i>)	Kapabilitas	Non militer: ekonomi, politik domestik, lingkungan hidup, terorisme, narkoba dan penggunaan teknologi informasi
Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan (<i>the responsibility for providing security</i>)	Negara	Negara, Organisasi internasional dan individu.
Respon (<i>the responses</i>)	Militer	Non-militer: liberalisasi, ekonomi, demokratisasi, hak asasi manusia
Nilai inti (<i>core values</i>)	Kemerdekaan nasional, integritas teritorial, kedaulatan	Kesejahteraan ekonomi, hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup

Sumber: Hermawan, 2007: 43.

Globalisasi telah memunculkan kecenderungan similaritas dan uniformitas dari para individu, kelompok dan sistem sosial yang melewati dan atau bahkan menghapus batas tradisional negara (*vanishing traditional borders*). Dengan

demikian, globalisasi memunculkan aktor-aktor baru seperti gerakan separatis, kelompok penjahat lintas batas (*transnational criminal organizations*) dan kelompok-kelompok teroris internasional (Wolf, 2007:18).

2.1.2.2 Cyber Security

Cyber space didefinisikan sebagai media elektronik dan jaringan komputer di mana komunikasi terjadi secara online. Komunikasi yang terjadi dalam *cyber space* bisa melibatkan siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja selama media komunikasi memungkinkan. Berbeda dengan darat, laut, dan udara yang memiliki batasan jelas sebagai wilayah teritorial sebuah negara, *cyber space* tidak memiliki batasan tersebut dan menjadi entitas baru dalam *national security*.

Menurut Dewi Triwahyuni dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi mengatakan Ada banyak terminologi dan interpretasi yang dihubungkan dengan konsep “*cyber security*” atau “keamanan *cyber*”. Karena cyberspace merupakan ruang virtual yang terbentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi. Teknologi yang dimaksud ialah teknologi informasi dan komunikasi. Maka konsep keamanan *cyber* tidak lagi hanya menyentuh wilayah teknologi tapi telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional (Triwahyuni, 2016: 110).

Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan perubahan signifikan mengenai konsep keamanan, kini ruang interaksi tidak bisa hanya dibatasi seara fisik (*physic*) tapi juga meluas ke dunia maya (*cyber*). Konsekuensinya, negara harus beradaptasi dengan perkembangan ini konsep keamanan dunia maya (*cyber security*) sudah saatnya ditetapkan sebagai salah satu “wilayah” negara yang jaga keamanannya sebagaimana kewajiban negara

mengamankan teritorialnya. Apalagi, serangan *cyber* tidak hanya terjadi pada institusi publik saja, namun juga menyerang institusi pemerintah.

Keamanan *cyber* ditujukan pada isu keamanan informasi bagi pemerintahan, organisasi dan urusan individual yang dihubungkan dengan teknologi ICT, dan secara khusus dengan teknologi internet. Keamanan *cyber* tidak dapat diabstraksikan terlalu jauh dari wilayah aplikasinya dan lingkungan sosialkultural. Terminologi “keamanan informasi (*information security*)” dan keamanan *cyber* adalah dua konsep berbeda. Dalam konteks tertentu ada kesamaan pemahaman jika dikaitkan dengan proteksi aset atau perlawanan terhadap spionase industri dan ekonomi, perlawanan terhadap terorisme atau kejahatan ekonomi, perlawanan terhadap konten-konten terlarang. Dalam konteks lain, dua konsep tadi memiliki perbedaan. Keamanan *cyber* mencakup segala sesuatu berhubungan dengan pengawasan komputer, monitoring sampai kontrol yang sangat ketat atau perjuangan untuk hak asasi fundamental (Triwahyuni, 2016: 111).

Sedangkan keamanan informasi berhubungan dengan isu-isu yang lebih luas, seperti kedaulatan negara, keamanan nasional, proteksi atas infrastruktur penting, keamanan aset-aset yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan proteksi data personal dan sebagainya

Merriam-Webster mendefinisikan *cyber* sebagai: “*of, relating to, or involving computers or computer networks (as the internet)*”. *Cyberspace* lebih dari sekedar internet, *hardware*, *software*, dan sistem informasi, tetapi juga orang dan interaksi sosial dalam jaringan ini. *Cyberspace* sekarang menjadi tempat persaingan kepentingan antara kelompok-kelompok kepentingan, serta sebuah tempat

perpanjangan tangan pemerintah dalam konflik dan perselisihan. Kita tidak bisa lagi menepis lebih jauh lagi politik tersembunyi dari *cyberspace*.

Beberapa negara maju telah menggunakan jaringan internet dalam menopang dan mengatur aktivitas-aktivitas dalam negaranya, seperti aktivitas perbankan, kontrol pada transportasi, menjalankan infrastruktur, pengendalian dan pengadaan senjata pada bidang militer, penyimpanan data dan informasi, pendidikan dll. Semua aktivitas-aktivitas interkoneksi tersebut bermuara pada *cyberspace*.

Cyberspace sebagai domain baru tanpa batas pada era informasi (*information age*) selain membawa beragam kemudahan bagi berbagai aspek kehidupan bernegara, *cyberspace* juga telah menghadirkan sebuah realitas baru yang menjadi sumber bagi kerentanan, potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kegaduhan terhadap tatanan internasional. Hal ini bahkan diakui oleh pemerintah Amerika Serikat melalui pernyataan presiden Obama, bahwa ancaman yang hadir dari *cyberspace* berpotensi melemahkan kepercayaan diri negara dalam sistem informasi yang mendasari kepentingan ekonomi dan keamanan nasional negaranya. Kerentanan pada *cyberspace* sering kali menjadi celah bagi individu, kelompok bahkan negara untuk melakukan kejahatan (*cyber crime*).

Untuk negara Tiongkok telah membentuk organisasi publik pertama di bidang *cyber security* yang bertujuan untuk melindungi *cyber security* nasional negara tersebut dan membantu perusahaan-perusahaan internet dalam menjalankan aktivitas mereka. *The Cyber Security Association of Tiongkok* (Asosiasi keamanan siber Tiongkok) yang diluncurkan pada hari Maret 2016 beranggotakan institusi

akademis, individu, dan perusahaan internet terkenal seperti Tencent dan Qihu 360, sebuah perusahaan keamanan internet terkenal di negara tersebut. Organisasi ini akan mempromosikan cara-cara untuk memproteksi diri sendiri terhadap serangan *cyber*, mempercepat standardisasi industri, meningkatkan studi *cyber security*, dan berpartisipasi dalam kerjasama internasional. Wang Xiujun, wakil direktur Administrasi *Cyberspace* Tiongkok yang merupakan regulator internet di Tiongkok, mengatakan bahwa ia berharap asosiasi baru ini dapat menjaga keamanan Internet dan memperkokoh Tiongkok sebagai salah satu kekuatan Internet dengan menarik perusahaan-perusahaan *cyber security* (diakses <https://kriptologi.com/2016/03/27/Tiongkok-bentuk-organisasi-cyber-security-pertama/> pada tanggal 10 April 2017).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri merupakan hal yang sangat penting pada suatu tananan negara. Menurut Donald E. Nuchterlin menyatakan bahwa ada 4 dimensi yang mempengaruhi kepentingan nasional, yaitu:

1. Kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politik dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.

3. Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.
4. Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

(Nuechterlein, 2005:74)

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Kepentingan nasional merupakan hasil kompromi politik antara berbagai pihak dalam suatu negara yang berbeda kepentingannya. Kepentingan nasional juga diartikan sebagai kemampuan minimum negara bangsa dalam melindungi identitas fisik (wilayah), identitas politik, ekonomi, identitas kulturalnya dari ancaman negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama atau konflik.

Kepentingan nasional pada dasarnya adalah rangkuman aspirasi suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan-tujuan nasional tersebut, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional. Menurut Robinson, terdapat beberapa strata yang membagi kepentingan nasional, yaitu:

1. Kepentingan Primer (*Primary Interest*), merupakan kepentingan nasional yang memberikan perlindungan pada kedaulatan dalam negara, yang termasuk di dalamnya wilayah, identitas politik, budaya dan keberlangsungan hidup dari ancaman eksternal. Kepentingan primer ini

tidak dapat diganggu gugat, sehingga negara secara total mempertahankan untuk pencapaian kepentingan ini.

2. Kepentingan Sekunder (*Secondary Interest*), kepentingan yang hampir sama halnya dengan kepentingan primer, akan tetapi kepentingan sekunder diarahkan keluar negara tersebut. Contohnya, melindungi warga negara dan melindungi aset-aset yang berada di luar negeri.
3. Kepentingan Permanen (*Permanent Interest*), merupakan kepentingan yang tidak berubah dan jangka waktu yang lama.
4. Kepentingan Tidak Tetap (*Variabel Interest*), merupakan kepentingan yang dilakukan secara kondisional yang berarti dianggap penting pada waktu tertentu.
5. Kepentingan Umum (*General Interest*), merupakan kepentingan yang dilakukan dan diterapkan pada banyak negara atau untuk beberapa bidang seperti perdagangan, keamanan regional/internasional dan sebagainya.
6. Kepentingan Khusus (*Specific Interest*), merupakan kepentingan yang diterapkan pada bidang dan waktu tertentu, biasanya sebagai bentuk penekanan pada kepentingan umum.

(Coulumbis dan Wolfe,2004:110)

Setiap langkah yang diambil para pembuat keputusan (*decision makers*) dalam merumuskan kebijakan luar negerinya (*foreign policy*) harus sesuai dengan kepentingan nasional dan di arahkan untuk mencapai serta melindungi cita-cita kepentingan nasional itu.

Kepentingan nasional Tiongkok dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Kepentingan politik
 2. Kepentingan keamanan
 3. Kepentingan ekonomi
 4. Kepentingan budaya
1. Kepentingan politik Tiongkok yang utama adalah menjadi negara nomor satu di regional asia , baik itu di sektor ekonomi maupun sektor keamanan, bisa kita lihat bahwa sektor ekonomi merupakan poros utama dalam kepentingan politiknya, jadi kepentingan politik dan ekonomi negara Tiongkok tidak dapat dipisahkan.
 2. Kepentingan keamanan Tiongkok menjadi perhatian besar oleh pemerintahan Tiongkok dilihat dari kenaikan sebesar 600% dari tahun 2000-2014 (diakses <http://www.artileri.org/2014/03/Tiongkok-tingkatkan-anggaran-pertahanan-asia-pasifik-memanas.html> pada tanggal 5 Juni 2017). Tiongkok melakukan hal ini dikarenakan Amerika menggunakan anggaran paling besar untuk sektor keamanan, agar tercipta *balance of power*.
 3. Kepentingan Tiongkok menitik beratkan di sektor ekonomi, ekonomi yang menjadi poros utama dari politik luar negeri Tiongkok, Tiongkok beranggapan bahwa dengan kuat nya sektor ekonomi maka semua sektor akan menyusul menjadi kuat. Bisa dilihat bahwa hampir semua perusahaan besar di dunia melakukan produksi di negara Tiongkok untuk menekan biaya produksi, dengan catatan menggunakan bahan baku dari negara Tiongkok.
 4. Kepentingan budaya Tiongkok tidak bisa kita lepaskan dari keseharian kita, hampir dari semua negara di dunia terpengaruh budaya dari Tiongkok, sebut

saja makanan mie yang berasal dari Tiongkok. Dan penyebaran warga negara Tiongkok di berbagai negara, hampir di seluruh negara di dunia mempunyai *Tiongkok Town* yakni pusat kebudayaan negara Tiongkok di suatu daerah atau negara (Yan, 2012 : 19).

Dari masing-masing kategori tersebut dapat dibagi lagi ke dalam kepentingan yang lebih konkrit. Kepentingan politik dapat dibagi dalam kemerdekaan politik, kedaulatan negara, dan status internasional. Kepentingan keamanan dapat dibagi menjadi superioritas militer, keamanan teritorial, kepentingan maritim, dan sebagainya. Kepentingan ekonomi dapat dibagi ke dalam perdagangan ekspor dan impor, finansial internasional, investasi luar negeri, dan sebagainya. Kepentingan budaya termasuk dalam penyebaran budaya nasional serta perlindungan dari ide budaya asing (Deliarnov 2006:34) .

2.1.4 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah salah satu bidang kajian Hubungan Internasional dan kebijakan luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Dalam kajian kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi *output*. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu Negara.

Kebijakan luar negeri adalah aksi dari suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya yang diformulasikan dari kepentingan internasional, kapabilitas,

pembuat kebijakan, kebutuhan, dan aspirasi dari masyarakat (Holsti dalam Jervis 2005 : 19). Dalam mempelajari kebijakan luar negeri pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu kebijakan luar negeri itu pada dasarnya adalah “*action theory*” atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.

Tindakan-tindakan eksternal negara tertuang dalam kebijakan luar negerinya meliputi berbagai macam jenis dan bentuk. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan mengkonsepkan bentuk dan jenis tindakan eksternal pada suatu negara. Rossenau dalam Perwita dan Yani mengkonsepkan kebijakan luar negeri dalam tiga konsep, dimana satu sama lain saling terkait, yaitu :

1. Kebijakan luar negeri dalam pengertian seperangkat orientasi (*a cluster of orientation*), yaitu yang berisikan seperangkat nilai-nilai ideal kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Orientasi ini merupakan hasil dari pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap letak strategis negaranya dalam politik dunia.
2. Kebijakan luar negeri dalam pengertian strategi atau rencana komitmen untuk bertindak (*as set of commitment and plans for action*), yang berisikan cara-cara dan sarana-sarana yang dianggap mampu menjawab hambatan dan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Strategi suatu negara ini didasari dari orientasi kebijakan luar negerinya, sebagai hasil interpretasi elit terhadap

orientasi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang membutuhkan suatu strategi untuk menghadapi situasi tersebut.

3. Kebijakan luar negeri dalam pengertian bentuk perilaku (*as a form of behavior*), merupakan fase paling empiris dalam kebijakan luar negeri. Konsep ketiga ini merupakan langkah-langkah nyata yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon kejadian dan situasi eksternal yang merupakan tranlasi dari orientasi dan artikulasi dari sasaran dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk baik tindakan-tindakan yang dilakukan maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri merupakan implementasi strategi kebijakan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu (Perwita & Yani, 2005 : 53-55).

Modelski dalam Dugis 2008 mengutarakan pendapatnya dalam menggambarkan Kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem kegiatan. Dengan perspektif ini, Kebijakan luar negeri dipandang sebagai suatu sistem di mana keputusan Kebijakan luar negeri dirumuskan dan direncanakan untuk dieksekusi. Selain itu, Modelski dalam Dugis 2008 mencatat bahwa kebijakan tentu dirumuskan di bawah bimbingan prinsip-prinsip tertentu dan harus dibuat dengan tujuan tertentu.

Konsep dasar dalam kebijakan luar negeri, oleh karena itu, adalah:

1. Pembuat kebijakan
2. Tujuan
3. Prinsip

4. Kekuasaan untuk melaksanakan
5. Konteks di mana kebijakan luar negeri dirumuskan (Dugis, 2007:2).

Breuning (2007) dalam tulisannya yang berjudul *Foreign Policy Analysis A Comparative Introduction* menyebutkan bahwa terdapat tiga hal penting untuk memahami kebijakan luar negeri secara utuh, karena kebijakan luar negeri tidak bisa hanya dinilai dari satu sudut pandang saja. Ketiga hal tersebut adalah *individual level analysis*, *state level analysis*, dan *system level analysis*. Dengan memahami ketiga bagian ini kita akan mampu memahami hubungan komparasi dalam segi pembuatan keputusan, perilaku kebijakan luar negeri, dan interaksi antar negara. Bagian inilah yang dikenal sebagai *comparative methods*. Metode ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan mengenai pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dan untuk merespon dengan tepat terkait dengan tindakan aktor lain. Tujuan utama dilakukannya perbandingan kebijakan luar negeri adalah untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang bagaimana kebijakan luar negeri dibuat, mengapa pemimpin membuat keputusan tersebut, mengapa negara terlibat dalam perilaku kebijakan luar negeri tertentu, serta untuk menilai peluang dan kendala didalam sistem internasional (Breuning, 2007: 11–17).

Menurut Jack C. Plano dalam kamus Hubungan Internasional menerangkan mengenai kebijakan luar negeri (*foreign policy*) yaitu:

“Strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikembalikan untuk mencapai tujuan nasional yang khusus” (Plano 2000 : 47).

Selain itu Plano mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang ditempuh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan sasaran yang spesifik. Menetapkan faktor-faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri.
2. Menganalisis kapabilitas nasional untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
3. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. Melaksanakan tindakan yang dianggap perlu.
5. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan hasil yang dikehendaki (Plano, 2000 : 48).

Dalam melakukan kebijakan luar negeri suatu negara dihadapkan pada pilihan-pilihan mengenai instrumen yang akan digunakan. Holsti membagi instrumen kebijakan luar negeri menjadi lima, yaitu: diplomasi, propaganda, ekonomi, intervensi, dan tindakan militer terselubung, dan persenjataan, perang dan pengaruh politik (Holsti dalam Jervis, 1991 : 9).

Kajian mengenai teori proses pembuatan keputusan luar negeri menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan nasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif yang ada, dengan keuntungan yang sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap

semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan (Mas'oed, 2000 : 276).

Dalam melakukan kebijakan luar negeri suatu negara dihadapkan pada pilihan-pilihan mengenai instrumen yang akan digunakan. Holsti membagi instrumen kebijakan luar negeri menjadi lima, yaitu: diplomasi, propaganda, ekonomi, intervensi, dan tindakan militer terselubung, dan persenjataan, perang dan pengaruh politik (Holsti dalam Jervis, 2005 : 58).

Rosenau dalam Yani Kebijakan Luar Negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa lingkungan eksternalnya (Rosenau, 2010:4).

Menurut Holsti dalam Yani Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:

- a. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
- b. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.

- c. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
- d. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan tindakan yang diperlukan (Rosenau, 2010:4).

Tujuan dari kebijakan luar negeri menurut Rosenau dalam jurnal Yanyan Mochamad Yani sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dimana aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan suatu negara (Rosenau, 2010:5).

Rosenau dalam Mochammad Yani juga mengutarakan Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini termasuk tujuan yang spesifik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang dan tantangan dari luar negeri. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa

langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal. Langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik, jadi kebijakan luar negeri dapat dibedakan sebagai sekumpulan orientasi, sekumpulan komitmen dan rencana aksi, dan sebagai suatu bentuk perilaku. Setiap negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi di luar negara (Perwita & Yani, 2008:7-8).

Sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri menurut Rosenau dalam Yani , yaitu:

Sistemik (*systemic sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan di antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk diantara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas di antara mereka. Sementara faktor situasional eksternal merupakan stimulan tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terakhir.

Sumber masyarakat (*societal sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik. Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi, dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antara anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi mencakup

kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan sendiri. Hal ini dapat mendasari kepentingan negara tersebut untuk berhubungan dengan negara lain.

Sumber pemerintahan (*governmental sources*), merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal. Sementara dari struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan.

Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.

Selain keempat sumber kebijakan luar negeri di atas, terdapat pula hirauan akan faktor ukuran wilayah negara dan ukuran jumlah penduduk, lokasi geografi, serta teknologi yang dapat terletak pada sumber sistemik atau masyarakat. Dengan banyaknya faktor yang beraneka ragam, Rosenau menyarankan untuk melakukan *cluster of input*, dimana penstudi kebijakan luar negeri dapat memilih dan menggabungkan faktor mana yang paling penting dan patut diberi perhatian dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara yang diteliti (Rosenau, 2010:11-12).

2.1.5 *Multinational Corporations* (MNCs)

Perusahaan multinasional (PMN, mengacu pada multinational corporation atau MNC) menurut W. F. Schoel et. al. (1993) adalah sebuah perusahaan yang

berbasis di satu negara (disebut negara induk) dan memiliki kegiatan produksi dan pemasaran di satu atau lebih negara asing (negara tuan rumah).

Menurut Kamus Ekonomi, perusahaan multinasional adalah “sebuah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan pelayanan diluar negaranya sendiri. Perusahaan multinasional tersebut mengambil keputusan pokoknya dalam suatu konteks global dengan negara-negara tempat perusahaan tersebut bekerja. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional yang cepat serta memungkinkan bahwa dapat timbul konflik-konflik antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara individual tempat mereka beroperasi telah menimbulkan macam-macam perdebatan antara para ahli ekonomi paada tahuntahun belakangan ini. (Anorogo, 2009 : 85)

S.C Certo (1997) memberikan batasan PMN sebagai “sebuah perusahaan yang memiliki operasi yang signifikan pada lebih satu negara”. Jadi, PMN adalah sebuah organisasi yang terlibat dalam kegiatan bisnis di tingkat internasional. Ia menjalankan kegiatannya dengan skala internasional yang tidak memandang batas negara dan dipimpin oleh sebuah strategi bersama dari sebuah induk (pusat) perusahaan. (Anorogo, 2009 : 85)

Walaupun PMN di seluruh dunia berbeda satu sama lain dalam hal volume penjualan, keuntungan, pasar yang dilayani, dan jumlah anak perusahaannya, akan tetapi mereka mengindikasikan beberapa sifat yang sama, yaitu :

1. Membentuk afiliasi di luar negri.
2. Beroperasi dengan visi dan strategi mendunia (*global*).
3. Kecendrungan untuk memilih jenis-jenis kegiatan bisnis tertentu.

4. Kecendrungan untuk menempatkan afiliasi di negara-negara yang maju di dunia.

Menempuh satu dari tiga strategi dasar yang bersangkutan dengan staffing.
(Puspoprano, 2009 : 57)

Ada beberapa badan hukum yang dapat digunakan oleh perusahaan multinasional dalam aktivitas operasinya, yaitu: (Anorogo, 2009 : 86-87)

1. Perusahaan Cabang

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perusahaan multinasional induknya.

Perusahaan Subdiary (*wholly owned subsidiary*)

Merupakan anak perusahaan yang berbadan hukum sendiri. Saham perusahaan ini sepenuhnya di miliki oleh perusahaan induknya.

- a. Perusahaan Patungan

Merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan sebagai partner.

- b. Perusahaan *Go Public* atau *Public Company*

Merupakan perusahaan yang berkedudukan lokal dan sebagian sahamnya dipegang masyarakat.

- c. Perusahaan dengan bentuk lainnya

Pembentukannya yang didasarkan pada ketentuan perundangan yang ada, seperti di bidang perbankan, pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan ataupun jasa lainnya.

Sedangkan menurut Rachmat Soemiro, bentuk badan hukum

perusahaan multinasional di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Perusahaan Cabang

Merupakan bagian yang secara formal tidak terpisahkan dari kantor atau usaha pusatnya (MNC induknya). Dengan demikian bukan merupakan badan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, manajemen, administrasi, keuangan, serta kebijakan yang dilaksanakan identik dengan MNC induk dan dikendalikan dari kantor pusat tersebut.

2. Subsidiary

Adalah perseroan anak yang merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, terlepas dari perseroan induknya dan lazimnya didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat pendirian. Perseroan induk biasanya memiliki seluruh saham-saham subsidiary, tetapi sering pula terjadi bahwa sebagian dari saham-saham itu dimiliki oleh perseroan lain di negara tempat pendirian sehingga terjadi *joint-venture* (Anorogo, 2009 : 86-87).

2.1.6 Internet Censorship

Keberadaan sistem komunikasi via internet membawa perubahan yang sangat besar terhadap studi Hubungan Internasional. Fenomena yang nampak dari kemunculan internet ini adalah kemunculan komunitas-komunitas maya yang menghubungkan individu dan masyarakat dari suatu negara secara paralel dengan individu dan masyarakat dari negara lain. Teknologi internet ini juga telah mentransformasi pandangan ilmuwan politik tentang negara. Konsep negara modern yang mengisyaratkan bahwa negara adalah komunitas yang memiliki

penduduk yang tetap, wilayah yang tetap, pemerintahan yang tetap, serta otonomi kekuasaan politik dan hubungan internasional pada institusi pemerintahan kini tidak lagi mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang memunculkan ‘masyarakat maya’ atau jaringan individu berbagai bangsa dan etnis. Masyarakat maya ini menggunakan ruangruang cyber untuk saling bertukar informasi, menjalin hubungan kekerabatan, melakukan transaksi ekonomi dan bisnis, hingga operasi tindak-tanduk kejahatan baru dengan skala global yang sulit dikontrol oleh negara.

Permasalahan baru bermunculan dalam ruang cyber ini seperti kemunculan kejahatan dan penipuan bentuk baru contohnya hacker, serangan virus terhadap situs pemerintah dan bisnis, situs porno yang menyediakan jasa seks virtual, penipuan bisnis daring, pembobolan akun bank, hingga kejahatan multidimensional seperti cyber terrorism. Negara merespon masalah tersebut dengan pembentukan departemen yang membuat regulasi teknologi informasi dan unit khusus di kemiliteran dan kepolisian yang menangani kejahatan maya ini. Korporasi pun merespon hal ini dengan pembentukan lembaga khusus di bidang pengembangan situs dan teknologi informasi.

Dalam urusan yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara, polisi internasional (Interpol) difungsikan untuk menindak kejahatan yang telah menembus otoritas negara. Sebuah lembaga riset pemerintah Amerika Serikat (AS), *National Science Foundation* (NSF) membantu pengembangan jaringan *Advanced Research Project Agency Network* (ARPANET) agar dapat menghubungkan situs milik lembaga non militer dan universitas dengan ARPANET. Jaringan ARPANET

kemudian berganti nama menjadi internet karena fakta bahwa jaringan ini menghubungkan banyak sekali organisasi baik pemerintah, universitas, LSM, maupun institusi swasta (Cheek, 2006 : 28). Pembentukan jaringan ARPANET, yang kemudian berevolusi menjadi Internet, ini ditujukan agar Kementerian Pertahanan AS memiliki media komunikasi alternatif apabila terjadi kerusakan dalam jaringan informasi lain seperti telegraf, telepon, hingga surat pos. Penemuan teknologi surat elektronik memudahkan lembaga kemiliteran dan lembaga penelitian di AS untuk memiliki akses jaringan informasi yang cepat, mudah, dan rahasia. Dengan demikian faktor-faktor yang menghambat pertukaran informasi secara cepat dan rahasia akhirnya dapat dipecahkan melalui jaringan internet yang mampu menembus batas linear ruang dan waktu (Cheek ,2006 : 37).

2.1.7 Peranan *Information and Communication*

ICT adalah Information and Communication Technologies dimana ICT mengacu pada teknologi yang menyediakan akses terhadap komunikasi, dimana dengan menggunakan ICT ini orang dapat berkomunikasi secara realtime dengan orang di negara lain dengan menggunakan *instant messaging*, Volp (*voice over internet protocol*) dan video conference seperti kita tahu bahwa *video conference* adalah layanan yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua pihak atau lebih yang berada di lokasi yang berbeda, menggunakan jaringan computer dengan komunikasi Audio dan Video. dan ICT kerap dipelajari dalam konteks bagaimana teknologi komunikasi mempengaruhi masyarakat terutama masyarakat dunia. dalam konteks hubungan internasional misal melalui wikileaks dimana wikileaks ini terkenal dengan media yang membocorkan informasi negara negara atau

pemerintahan tanpa melalui izin. contoh wikileaks membocorkan "sifat asli" kepala negara X dengan ini semua masyarakat dapat mengakses dan membaca wikileaks. tentu aja hal ini dapat mempengaruhi masyarakat dan dapat memicu peperangan dingin.

Fenomena kebangkitan ICT menciptakan era baru yang disebut era informasi. Dengan dimulainya era ini maka sangatlah penting penguasaan di bidang ICT dan segala bidang terkait untuk dikuasai negara-negara dunia karena perkembangan ICT sendiri dirasa telah menimbulkan kerawanan dan ketergantungan kepada negara industri maju. Yang baik di suatu negara dapat meningkatkan daya interaksi antar masyarakatnya yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri finansial dan militer suatu negara. Sylvia Octa Putri memaparkan bahwa dalam kajian Hubungan Internasional dengan penguasaan ICT jalan suatu negara untuk menyebarkan power dan influence ke negara lain menjadi semakin mudah. Sayangnya terjadi disparitas kepemilikan kapabilitas di sektor ICT antara satu negara dengan negara yang lain atau antara kelompok negara maju dengan negara berkembang dan tertinggal (Putri, 2015 : 130). Misalnya Bagaimana negara-negara Afrika mencoba mengatasi ICT di segala sektor namun terkendala masalah energi dalam distribusi listrik sehingga digitalisasi penerapan teknologi ICT bahkan arus informasi sulit dilakukan. Bagi negara negara dengan tingkat kapabilitas ICT yang tinggi maka mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat memanipulasi aliran informasi internasional. Hal itu berarti bahwa kelompok negara maju memiliki akses informasi dan kesempatan yang lebih besar untuk menyebarkan kekuasaan dan pengaruhnya ke negara lain, termasuk

melakukan ekspansi budaya. Adanya disparitas dalam aliran informasi secara salah pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya sebuah hubungan yang asimetris antara negara-negara dengan kapabilitas ICT kuat dan yang lebih lemah (Putri, 2015: 130).

Dengan kata lain, hubungan internasional memerlukan teknologi informasi untuk menjalankan aktifitas-aktifitas dalam ruang lingkup masyarakat internasional itu sendiri seperti mengambil kebijakan-kebijakan internasional, untuk saling terhubung dengan sesama aktor internasional, dan juga yang terpenting adalah untuk dapat mampu mengikuti arus globalisasi yang berkembang sangat pesat pada jaman sekarang ini.

2.2 Kerangka Pemikiran

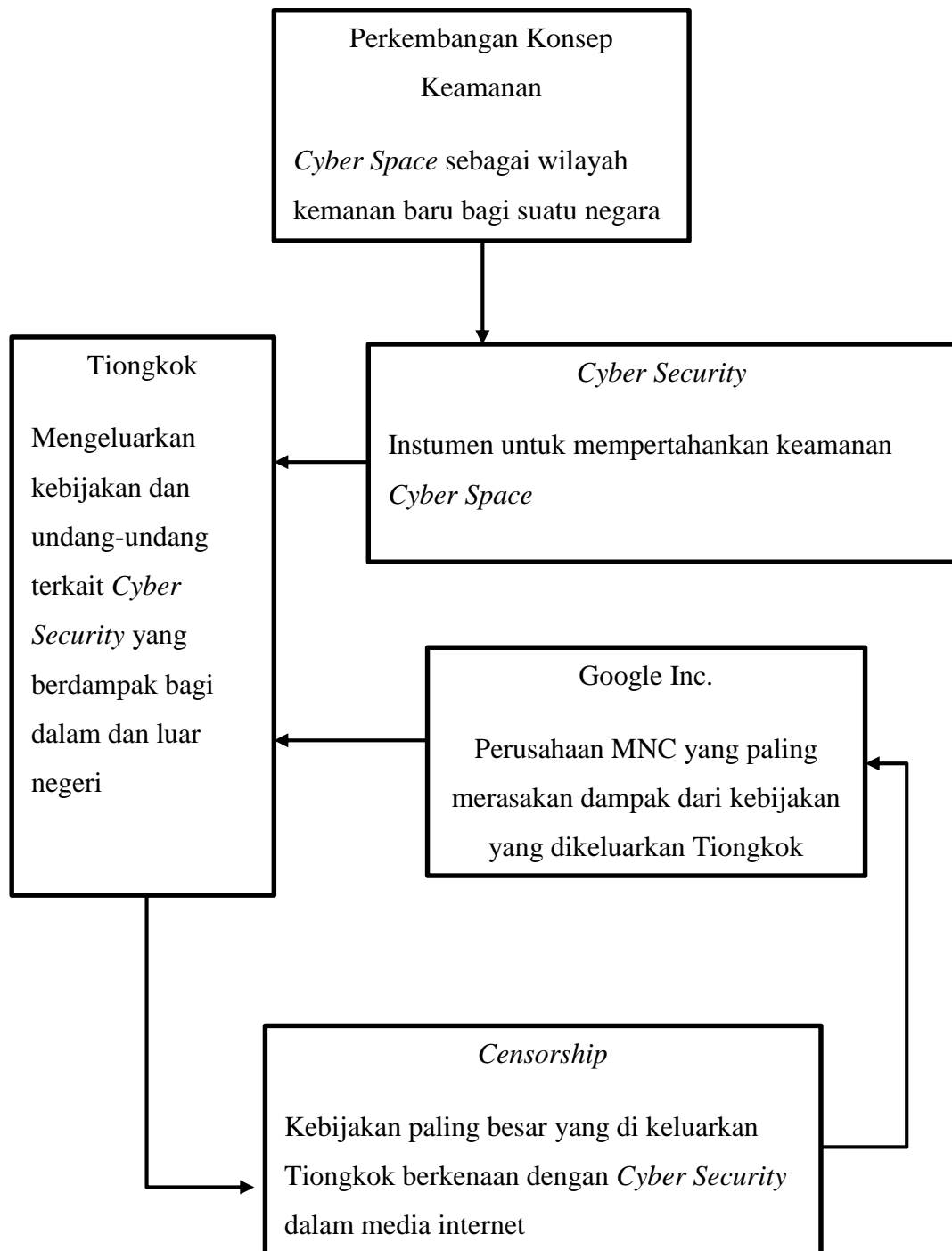
Cyber security yang merupakan bentuk perkembangan dari konsep keamanan memang menjadi perhatian besar hamper seluruh negara-negara di dunia. Yang awalnya ruang lingkup kemanan suatu negara hanya mencakup 3 sektor keamanan yaitu keamanan darat, keamanan laut, dan keamanan udara, sekarang bertambah dengan adanya *cyberspace* sebagai konsep baru wilayah kemanan suatu negara. *Cyberspace* sendiri tidak seperti sektor lainnya yang dapat dilihat secara langsung, tetapi *cyberspace* adalah suatu sektor keamanan yang bentuknya maya dan tidak terlihat tetapi tetap harus di jaga atas dasar keamanan nasional.

Negara Tiongkok dalam menjaga keamanan *cyber* mengeluarkan banyak kebijakan hanya untuk menjaga keamanan cybernya, salah satu dari banyak kebijakan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan *censorship*. *Censorship*

di negara Tiongkok ini berkenaan dengan bahaya penyebaran informasi yang terlalu bebas dan tidak terkontrol dan tentu saja dapat menimbulkan kesalah persepsi di masyarakat yang notabene adalah rakyat Negara Tiongkok.

Censorship internet di negara Tiongkok sendiri menimbulkan perlawanan dari berbagai pihak, baik itu *state actor* maupun *nonstate actor*. Amerika Serikat sebagai *state actor* paling mengecam atas kebijakan Tiongkok yang dinilai melanggar kebebasan rakyatnya untuk menerima informasi, dan ada Google inc. sebagai *non state actor* yang merasa dirugikan atas kebijakan dari Pemerintah Tiongkok. Keadaan ini membuat terjadinya istilah *cyber warfare* antara negara Tiongkok dan perusahaan MNC milik Amerika Serikat yaitu Google inc.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Gambaran Singkat Kerangka Pemikiran